

POLICY BRIEF | PUSAT KAJIAN REFORMASI ADMINISTRASI

MINAT MAHASISWA TERHADAP PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Profesi PNS memang menjadi salah satu profesi yang banyak diminati di Indonesia. Hal ini terbukti dengan jumlah pelamar CPNS pada tahun 2014 yang mencapai kurang lebih 2,6 juta orang. Berbagai alasan tentu melatarbelakangi seseorang untuk menjadi “abdi negara”. Apabila dibandingkan dengan instansi swasta, hasil survei terhadap mahasiswa menunjukkan perbandingan minat calon pelamar kerja terhadap profesi PNS dan Swasta tidak terlampau jauh, instansi swasta lebih banyak diminati daripada profesi PNS. Mereka yang berminat terhadap instansi pemerintah mengemukakan alasan yang paling dominan karena faktor “job security”, sedangkan yang berminat terhadap instansi swasta mengemukakan alasan yang paling dominan karena faktor “gaji”. Masih cukup tingginya minat mahasiswa untuk bekerja sebagai PNS tidak serta merta membuat birokrasi mendapatkan kandidat terbaik di pasar tenaga kerja, pemerintah harus mampu menjangkau kandidat terbaik untuk memenuhi SDM yang profesional.

Urgensi Kebutuhan SDM PNS Yang Profesional

Indonesia memiliki potensi pasar tenaga kerja yang besar, menurut data Sakernas BPS jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 mencapai 122,4 juta orang. Potensi pasar tenaga kerja yang besar ini tentu perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah dalam menjangkau kandidat terbaik untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada organisasi pemerintahan.

Hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas. Urgensi kebutuhan SDM yang berkualitas ini bukan tanpa alasan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan belum begitu menggembirakan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kualitas pelayanan publik di Indonesia yang masih jauh dari memuaskan. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2014 indeks pelayanan publik di Indonesia berada pada posisi 129 dari 183 negara. Dari segi akses dan kemudahan, Bank Dunia juga menetapkan Indonesia berada di peringkat 114 dari 188 negara (World Bank, 2014).

Lemahnya penyelenggaraan pelayanan publik “diperkuat” oleh buruknya integritas birokrasi, permasalahan korupsi menjadi isu yang senantiasa

hadir dalam bobroknya birokrasi di Indonesia. Hingga akhir 2014, Indonesia masih mengalami korupsi yang relatif tinggi. Dalam Corruption Perception Index 2014, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih).

Tentu saja, permasalahan di atas akhirnya berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Indonesia, permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah sosial ekonomi yang sulit untuk ditanggulangi. Menurut data BPS pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen).

Tantangan di atas merupakan

*“Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada salah satunya adalah untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja berbakat.”
(Lavigna & Hays, 2004)*

tantangan yang sifatnya internal dan hanya sekelumit dari kompleksnya permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, terdapat tantangan lain yang sifatnya eksternal. Dalam konteks pergaulan dunia, tentu pemerintah juga harus mempersiapkan diri dalam menjawab tantangan-tantangan global, salah satunya adalah kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kebutuhan SDM yang profesional di lingkungan birokrasi menjadi mutlak diperlukan, kandidat terbaik dari pasar tenaga kerja secara umum diasumsikan lahir dari tingkat pendidikan perguruan tinggi. Universitas dengan reputasi baik pada umumnya memiliki sumber daya yang unggul dan melahirkan SDM yang potensial dalam pasar tenaga kerja. Maka dari itu, minat mahasiswa terhadap profesi PNS sudah seharusnya dapat di maintenance oleh pemerintah.

Instansi Pilihan Kerja Mahasiswa

Minat mahasiswa terhadap profesi PNS diketahui melalui survei terkait instansi pilihan kerja. Survei dilakukan terhadap 1260 responden (mahasiswa) di tiga universitas yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Teknologi Bandung. Dari hasil survei diketahui bahwa separuh responden atau sebesar 50,1% responden menjawab “instansi swasta” sebagai instansi yang dipilih responden sebagai tempat kerja, kemudian disusul ditempat kedua yaitu sebesar 43,1% responden menjawab “instansi pemerintah”. Bila dilihat dari jumlah persentase, dua jenis instansi tersebut merupakan dua hal dominan yang dipilih oleh responden sebagai tempat pilihan kerja.

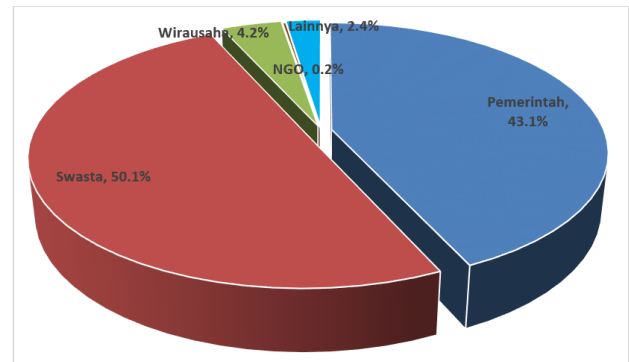
Adapun selanjutnya sebesar 6,8% responden menjawab

“the ability of government to provide services effectively and efficiently depends upon competent cadre of civil servants. Good government requires good people (Lavigna, 2004)”

minat kerja diluar instansi swasta dan pemerintah, yang terdiri dari: a) wirausaha (4,2%); c) NGO (0,2%); dan d) lainnya (2,4%). Untuk lebih jelasnya, instansi yang dipilih

responden sebagai tempat kerja dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 1. Instansi yang Dipilih sebagai Tempat Kerja



Sumber: PKRA LAN, 2015

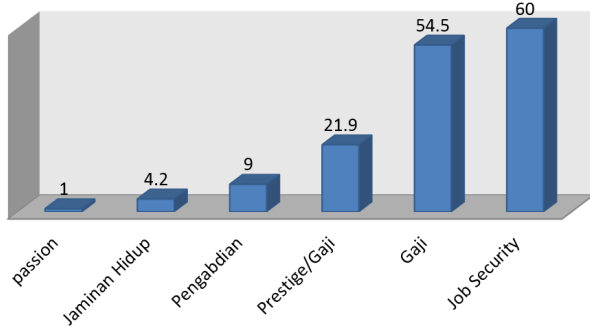
Diagram di atas menunjukkan bahwa minat mahasiswa untuk bekerja sebagai PNS tidak berbeda jauh dengan swasta. Dapat diketahui pula bahwa pola pikir mahasiswa secara umum masih sebagai job seeker bukan sebagai job creator. Walaupun instansi swasta lebih unggul dari instansi pemerintah, namun kecenderungan minat mahasiswa terhadap profesi PNS masih cukup besar. Artinya, secara ideal kesempatan pemerintah dalam upaya menjangkau kandidat terbaik di pasar tenaga kerja cukup tinggi.

Alasan Mahasiswa Memilih Instansi Pemerintah

Dalam bagian ini akan dikemukakan alasan responden memilih instansi pemerintah sebagai tempat bekerja, adapun responden dapat memilih lebih dari satu jawaban. Dari hasil survei yang telah dilakukan, lebih dari setengahnya atau sebesar 60% responden menjawab “job security” sebagai alasan tertinggi bagi responden memilih instansi pemerintah sebagai tempat bekerja. Sementara itu, diurutkan kedua yaitu sebesar 54,5% responden menjawab “gaji” sebagai alasan memilih instansi pemerintah sebagai tempat bekerja. Selanjutnya, beberapa alasan lainnya seperti: a) “prestige” sebesar 29,9%; b) “pengabdian” sebesar 9%; c) jaminan hidup sebesar 4,2%; dan d) “passion” sebesar 1%.

Untuk lebih jelasnya mengenai alasan responden memilih instansi pemerintah sebagai tempat bekerja dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 2. Alasan Memilih Instansi Pemerintah (dalam Persen)



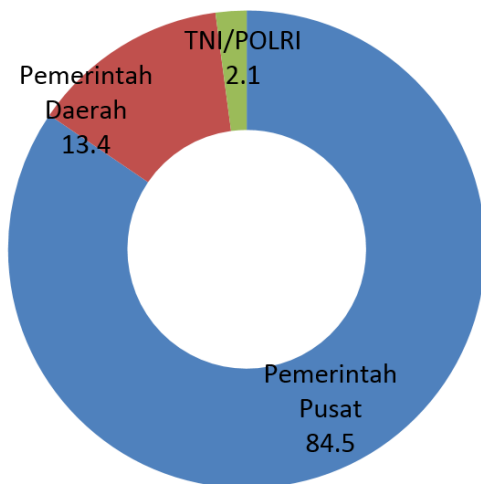
Sumber: PKRA LAN, 2015

Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap jenis instansi pemerintah yang diminati. Jenis instansi pemerintah ini dibagi menjadi a) Pemerintah Pusat; b) Pemerintah Daerah; c) dan TNI/POLRI.

Dari hasil survei yang telah dilakukan, sebesar 84,5% responden menjawab Pemerintah Pusat sebagai jenis instansi pemerintah yang paling diminati responden, angka ini tentu merupakan angka yang sangat signifikan dibandingkan dengan dua jenis instansi pemerintah lainnya. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang menjawab Pemerintah Daerah sebesar 13,4% dan lebih kecil lagi untuk TNI/POLRI yang hanya sebesar 2,1%.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis instansi pemerintah yang diminati responden dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 3. Jenis Instansi Pemerintah yang Diminati (dalam Persen)



Sumber: PKRA LAN, 2015.

Alasan Mahasiswa Memilih Instansi Swasta

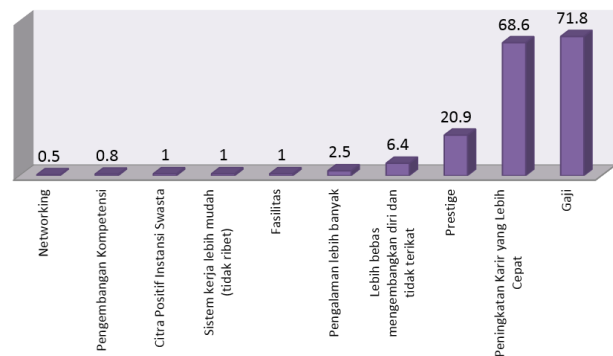
Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai alasan responden dalam memilih instansi swasta, adapun responden dapat memilih lebih dari satu jawaban. Dari hasil survei yang telah dilakukan, sebesar 71,8% responden menjawab “gaji” sebagai alasan memilih instansi swasta sebagai tempat bekerja. Selanjutnya, sebesar 68,6% responden menjawab “peningkatan karir yang lebih cepat” sebagai alasan memilih instansi swasta sebagai tempat bekerja. Sementara itu, ditempat ketiga sebesar 20,9% responden menjawab “prestige” sebagai alasan memilih instansi swasta sebagai tempat bekerja.

Selanjutnya alasan-alasan lain responden memilih instansi swasta sebagai tempat bekerja antara lain:

- Lebih bisa mengembangkan diri dan tidak terikat (6,4%)
- Pengalaman lebih banyak (2,5%)
- Fasilitas (1%)
- Sistem kerja lebih jelas (1%)
- Citra positif instansi swasta (1%)
- Pengembangan kompetensi (0,8%)
- Networking (0,8%)

Untuk lebih jelasnya mengenai alasan responden memilih instansi swasta sebagai tempat bekerja dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 4. Alasan Memilih Instansi Swasta (dalam Persen)



Sumber: PKRA LAN, 2015.

Implikasi Kebijakan

Beberapa rekomendasi yang diajukan dalam menjaring calon pelamar kerja potensial agar bekerja sebagai PNS adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengambilan keputusan rekrutmen, institusi pemerintah harus fokus pada mengidentifikasi orang-orang yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang akan diisi. Perencanaan dalam rekrutmen memegang peranan penting dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya potensial.
2. Proses perekrutan memerlukan strategi yang efektif untuk mendapatkan kualifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam organisasi. Beberapa metode yang digunakan misalnya adalah “jemput bola” atau road show ke universitas-universitas untuk mengenalkan instansi pemerintah sebagai tempat berkarir.
3. Pemerintah perlu membangun database terkait profil dan preferensi pelamar kerja khususnya pelamar profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga akan diketahui gambaran latar belakang dan tren minat calon pelamar kerja.
4. Perlunya promosi dalam menjaring minat mahasiswa untuk bekerja sebagai PNS dengan memanfaatkan media-media cetak dan elektronik. Dalam hal ini, selain sosialisasi mengenai pola karir, perlu ditekankan paradigma “PNS sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat” sehingga motivasi calon pelamar kerja terhadap profesi PNS tidak selalu money oriented.

Referensi

Badan Pusat Statistik. 2015. Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2015. Jakarta: BPS.

Lavigna, Robert J. & Steven W.H. 2004. Recruitment and Selection of Public Workers: An International Compendium of Modern Trends and Practices. Public Personnel Management.

PKRA. 2015. Laporan Kajian Survei Market Calon Pelamar Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Deputi Bidang Kajian Kebijakan (DKK), Lembaga Administrasi Negara, 2015

Wahyuni, Nurseffi Dwi. 2014. Jumlah Pelamar CPNS 2014 Tembus 2,6 Juta Orang. Available online at <http://bisnis.liputan6.com/read/2118194/jumlah-pelamar-cpns-2014-tembus-26-juta-orang> (diakses tanggal 12 Desember 2015)

World Bank. 2014. Indonesia: Menghindari Perangkap. Jakarta: The World Bank.

<http://www.transparency.org>

PENULIS POLICY BRIEF

Naufal Sabda Auliya

Pengolah data dan kajian pada Pusat Kajian Reformasi Administrasi
Lembaga Administrasi Negara

KONTAK PUSAT KAJIAN REFORMASI ADMINISTRASI

Kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 3, Jalan. Veteran Nomor 10, Jakarta 10110, T: +62 21 3868201-209 Ext. (107) (109); +62 21 3455021-025 Ext. (107) (109)

F: +62 21 3865102, Email: pkra@lan.go.id